KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kepercayaan Publik Bisa Tergerus: Hak Prerogatif
Tanggal : Selasa, 13 Januari 2015
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

Kepercayaan Publik Bisa Tergerus

■ Mas Alamil Huda, Halimatus Sa'diyah

Jokowi tetap melanjutkan proses pengangkatan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.

JAKARTA — Dipilihnya Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah. Apalagi, sebelum pemilihan Kapolri, Jokowi telah memilih Jaksa Agung M Prasetyo yang berasal dari partai politik dan sejumlah menteri yang dinilai titipan pihak-pihak tertentu.

Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Oce Madril mengatakan, nama Budi memang disebut-sebut sebagai salah satu dari beberapa perwira tinggi Polri yang memiliki rekening dalam jumlah yang tidak wajar. Jika Jokowi ingin semua pembantunya bersih, seharusnya dia memastikan dugaan tersebut dengan melibatkan KPK dan PPATK.

"Dugaan adanya rekening gendut yang dimiliki Budi Gunawan akan mendegradasi kepercayaan publik kepada polisi dan juga Jokowi sendiri," kata Oce saat dihubungi *Republika*, Senin (12/1).

Menurutnya, pemilihan calon Kapolri pengganti Jenderal Sutarman memang seharusnya dilakukan dengan melibatkan PPATK dan KPK. Dua lembaga tersebut memiliki wewenang untuk menelusuri rekam jejak seorang pejabat negara. Pelibatan KPK dan PPATK sebagai masukan untuk Jokowi untuk memastikan integritas calonnya.

Sementara itu, Jokowi mengatakan akan tetap melanjutkan proses pengangkatan Budi sebagai Kapolri. "Sekarang kita tunggu proses yang ada di DPR," ucapnya usai meninjau PT Pindad di Bandung, Senin (12/1).

Ketika ditanya soal alasan tidak dilibatkannya KPK dan PPATK, Jokowi enggan menjawab. "Nanti kalau saya jawab larinya ke tempat yang lain," ujar mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.

Politikus senior PDI Perjuangan yang juga menjabat sebagai menteri dalam negeri (mendagri), Tjahjo Kumolo, menilai wajar pilihan calon kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diajukan Presiden Joko Widodo. Selama calon tersebut diketahui memiliki rekam jejak dan kualitas yang bagus, tak ada alasan untuk menolak pilihan presiden.

"Pengangkatan kapolri, KSAU, KSAL adalah hak prerogatif presiden. Yang penting bukti-bukti yang presiden punya *clean and clear*. Soal memilih, pasti presiden akan memilih yang dia kenal, yang dia tahu," kata Tjahjo, di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Senin (12/1).

Menurut Tjahjo, dilibatkan atau tidaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga merupakan hak prerogatif presiden.

Sepanjang calon kapolri dinilai berkualitas dan bersih, menurutnya, tidak ada yang salah dari calon yang diajukan presiden.

Komjen Budi Gunawan, dia melanjutkan, menurut Presiden Jokowi memiliki jejak rekam yang bagus. Bahkan, hasil investigasi internal kepolisian juga menunjukkan yang bersangkutan tidak bermasalah.

"Soal Pak BG, dia *track record*-nya bagus, bisa dicek. Soal ada tuduhan, mari kita buktikan. Hasil telaah semua *clear*," ujar Tjahjo.

Anggota Komisi III Martin Hutabarat mengatakan cara Presiden menyampaikan pergantian ini kurang lazim. "Tidak seperti etika ketimuran kita," ujar Martin. Dia menuturkan, seharusnya Presiden Jokowi berbicara terlebih dahulu dengan Kapolri saat ini. "Ini kesannya Pak Sutarman *nggak* tahu-menahu kalau dia mau diganti," katanya.

Terkait hal di atas, Martin melihat apa yang dilakukan Jokowi telah melenceng dari keinginan masyarakat. Terutama dalam proses penunjukan ini tanpa melibatkan institusi KPK dan PPATK. Apalagi, sebelumnya pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), KPK selalu dilibatkan untuk membuktikan laporan harta kekayaan calon Kapolri.

■ c89 ed: muhammad hafil

Hak Prerogatif

Memilih menteri, Kapolri, dan Jaksa Agung merupakan hak prerogatif presiden. Tetapi, kebijakan Presiden Jokowi memilih sejumlah pembantunya dinilai kontroversial. Ini terkait dengan latar belakang calon yang dipilih atau proses pemilihannya yang tak melibatkan KPK dan PPATK. Berikut sejumlah pejabat yang dipilih Jokowi dan memunculkan kontroversi.

Pemilihan Kapolri
Budi Gunawan
- Tak melibatkan KPK dan PPATK, padahal pada era Presiden SBY, KPK diminta untuk menguji kebenaran harta kekayaan calon Kapolri
- Budi merupakan mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri 2001-2004
- Publik menilai, Budi merupakan titipan Megawati Soekarnoputri
- Budi pernah gencar diberitakan media massa terkait rekening gendut Rp 54 miliar pada 2010
- Budi pernah bertemu dengan komisioner KPU dan politikus PDIP di sebuah rumah makan pada masa pilpres 2014

Pemilihan Jaksa Agung
M Prasetyo
- Tak melibatkan KPK dan PPATK
- Prasetyo selama menjadi jaksa dinilai minim prestasi
- Prasetyo merupakan politikus Partai Nasdem
- Nama Prasetyo diajukan oleh penguasaha sekaligus pendiri Partai Nasdem Surya Paloh

Pemilihan Menteri BUMN
Rini Soemarno
- Rini merupakan teman dekat Megawati Soekarnoputri
- Rini pernah diperiksa oleh KPK dalam kasus korupsi BLBI

Pemilihan Menteri Pertahanan
Ryamizard Ryacudu
- Ryamizard disebut sejumlah aktivis HAM bertanggung jawab atas pelanggaran HAM Aceh 2003-2004
- Ia juga dikaitkan secara tidak langsung dengan pelanggaran HAM pembunuhan Dortheys Hiyo Eluay di Papua

Sumber: Pusat Data Republika